



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pejabat, sebuah kata yang identik terhadap pekerja atau karyawan dari sebuah instansi pemerintahan. Pejabat sendiri berasal dari penggabungan dua kata yakni pe- yang memiliki arti pemegang serta jabat dari kata jabatan atau pangkat. Semestinya seseorang yang telah memiliki jabatan adalah orang yang terpilih dan memiliki kredibilitas yang baik. Tapi di Indonesia justru sebaliknya, istilah pejabat seringkali dilekatkan dengan korupsi serta rakus, bahkan istilah pejabat Indonesia kerap kali di gambarkan dalam gambaran tikus berdasi. Gambaran ini dinyatakan pada lirik lagu Iwan Fals yang berjudul tikus kantor. Lagu tersebut merupakan kritik untuk pejabat yang berkerja di pemerintahan yang kerap korupsi. Dalam lagu tersebut Iwan Fals menganalogikan tikus sebagai pejabat yang berpakaian rapi berdasi. Kucing menggambarkan pengawas pejabat Hukum. Robert Klitgaard dalam Edy Herry (2016, h. 34) menjelaskan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Robert mengklasifikasikan korupsi menjadi dua yaitu *freelance* dan sistematis. Tindakan korupsi dikatakan *freelance* apabila individu atau kelompok mengambil keuntungan melalui kekuasaan yang dimilikinya, yang mendukung terjadi penyuapan. Sedangkan korupsi sistematis jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi politik.

Akibat dari tindakan pejabat yang gemar korupsi, persepsi masyarakat pun tinggi mengenai tindakan korupsi, implikasi dari hal tersebut adalah ketidakpercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini dibuktikan pada hasil indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh TII (*Transparency International Indonesia*) yang mengatakan Indeks persepsi korupsi 2015 menempatkan Indonesia di posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan level korupsi masih tinggi. Hingga akhir 2014, Indonesia memiliki skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih) (Nur dan Feri, 2015, para. 1)

Tidak tanggung tanggung dalam enam bulan pertama akibat korupsi Indonesia telah merugi hingga triliunan rupiah, itu pun hanya yang terungkap. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil tren korupsi semester I di tahun 2014. Menurut ICW, jumlah kerugian negara akibat adanya dugaan tindak pidana korupsi di Indonesia mencapai Rp 3,7 triliun pada semester I tahun 2014 (Laurel Benny, 2014, para. 1).

Kegiatan pejabat dalam tindak korupsi tidak hanya dalam skala kenegaraan tapi praktik dalam cakupan daerah pun dilakukan. Dalam berita Nasional.Tempo.com, Emerson mengatakan jumlah pejabat pemerintah daerah sebagai koruptor meningkat dari dua tahun sebelumnya. Pada laporan ICW tahun 2012, ada 48 pejabat pemda yang melakukan korupsi. Satu tahun berikutnya, ada 60 pejabat pemda jadi terdakwa kasus korupsi. "Dari 261 terdakwa korupsi tahun ini, ada 101 pejabat pemda yang terbukti sebagai koruptor," kata Emerson pada 3 Agustus 2014 (Yolanda Ryan, 2014, para. 2).

Dalam segi profesi, Tama S Langkun sebagai Ketua Divisi Investigasi ICW pada 17 Agustus 2014 menemukan 6 jabatan yang sering melakukan korupsi. Jabatan teratas yang tersangkut kasus korupsi yaitu pejabat negara kemudian diikuti kelompok swasta. Dalam temuannya ia mengatakan :

"*Pertama*, pejabat atau pegawai pemda/kementerian (42,6 persen). *Kedua*, direktur/komisaris/konsultan/pegawai swasta (18,9 persen), *ketiga*, kepala dinas (8,6 persen). *Keempat*, anggota DPR atau DPRD (7,5 persen), *kelima*, direktur/komisaris/pejabat pegawai BUMN atau BUMD (5,1 persen), dan terakhir kepala daerah (3,7 persen)," Amal dan (Herdi Muhardi. 2014, para. 5).

Seperti dalam pepatah yang mengatakan seseorang dipercaya berdasarkan ucapannya. Agar dapat menjalankan pemerintahan yang baik pejabat harus bisa meyakinkan publik dan menarik kepercayaan publik. Salah satu cara pejabat dalam menarik kepercayaan publik adalah melakukan obral janji serta beretorika manis demi membujuk publik untuk percaya kepada diri pejabat tersebut. Dalam penelitian ini konsentrasi peneliti tertuju pada retorika pejabat ketika berbicara kepada publik.

Retorika atau komunikasi retorik pada masa Aristoteles merupakan suatu seni berpidato dengan tujuan untuk mempersuasi publik. Pada masa tersebut retorika dipergunakan oleh majelis legislatur dan dipergunakan dalam pertemuan pada masyarakat. Sehingga Retorika tidak dapat dipisahkan dalam hal persuasi khususnya tindakan persuasi dari legislatur ke masyarakatnya (Deddy Mulyana, h. 146). Dalam perkembangannya Retorika tidak hanya dipandang lagi sebagai

keterampilan seni berpidato, Littlejohn Stephen dan Karen (2009, h.72) mengatakan pada awalnya, ilmu ini berhubungan dengan persuasi, sehingga retorika adalah seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato. Kemudian, berkembang sampai meliputi proses “*Adjusting ideas to people and people to ideas*” dalam artian menyesuaikan ide ke orang-orang dan orang-orang ke dalam ide dalam segala jenis pesan. Fokus dari retorika telah diperluas bahkan lebih mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat ia tinggal. Dengan kata lain retorika kini lebih ke bagaimana mempengaruhi orang lain lewat ide-ide atau gagasan-gagasan agar orang atau publik yang menerima pesan tertarik dan terbujuk untuk melakukan atau menyetujui apa yang kita pikirkan.

Ber-retorika memang bukan suatu hal yang bermasalah, tetapi akan menjadi masalah apabila apa yang dikatakan atau yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya pada iklan politik partai Demokrat yang terdiri dari beberapa kader serta pejabat RI antara lain Susilo Bambang Yudhoyono (sebagai Penasehat Partai dan Mantan Presiden RI), Edhie Baskoro Yudhoyono (Ketua Departemen Kaderisasi), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai), Angelina Sondakh (Sekertaris Fraksi Partai Demokrat), Andi Mallarangeng (Menteri Olah Raga) beretorika politik mengatakan dengan tegas Anti korupsi, pada saat berkuasa justru keterbalikannya dari 5 orang yang disebut di atas (dalam iklan katakan tidak pada korupsi), tiga diantaranya menjadi tersangka korupsi. Andi Mallarangeng serta Angelina Sondakh terjerat

kasus korupsi wisma atlet, serta Anas Urbaningrum terjerat kasus Hambalang. Hanya Susilo Bambang Yudhoyono serta Edhi Baskoro yang masih belum terbukti tapi tetap diisukan terjerat tindak korupsi.

Gambar 1.1 Iklan katakan tidak pada korupsi



Sumber : diolah melalui Youtube.com

Seperti peneliti katakan sebelumnya retorika memang bukan suatu hal yang bermasalah, tetapi akan menjadi masalah apabila apa yang dikatakan atau yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Tujuan utama retorika adalah membujuk, dalam membujuk diperlukan suatu cara untuk dapat menarik kepercayaan dari orang yang akan dibujuk. Dalam hal kepemimpinan kepiawaian retorika sangatlah penting, hal ini menjadi tulang punggung dalam menjembatani antara kepentingan atau kebijakan organisasi dengan dukungan publiknya. Seperti yang di katakan oleh Herick dalam Zainul Maarif (2015, h.6) membuktikan pentingnya retorika sebagai bahan pelajaran dan menjadi hidup baru dalam sebuah pembelajaran,

“Meanwhile, rhetoric has become an important topic of study in recent years, and its significance to public discussion of important political, social, and even scientific issues has been widely recognized. Scholars and teachers have expressed great interest in topic. Many colleges and universities are again offering courses in rhetoric after having banished the term from their curricula for years, and dozens of books are published every year with rhetoric in their titles”.

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan retorika saat ini telah menjadi topik pembelajaran yang hangat, dan menjadi diskusi penting mengenai politik, social, dan karya ilmiah yang telah diakui secara luas. Guru maupun para sarjana sangat mengapresiasi dengan baik mengenai ketertarikannya kepada retorika. Banyak perguruan tinggi maupun universitas yang menawarkan kursus retorika sebagai pelajaran tambahan dalam kurikulumnya yang telah lama dilupakan, dan lusinan buku telah diterbitkan setiap tahunnya dengan tema retorika di setiap judul mereka. Dalam pendapat Herric tersebut, tidak diragukan lagi akan pentingnya retorika dalam hidup suatu kepemimpinan. Dengan Adanya kemampuan beretorika sebagai bahan pembelajaran yang mengalami pembaharuan hidup diharapkan pemimpin dapat mempersuasi public demi tercapainya kebijakan atau tujuan dari kelompok yang dipimpinnya khususnya politik.

Ditengah ketidakpercayaan masyarakat Indonesia oleh karena korupsi yang mempermainkan kepercayaan masyarakatnya dengan muncul suatu tokoh yang fenomenal dan kontroversial. Tokoh tersebut adalah Basuki Tjahaya Purnama dengan nama panggilan Basuki atau kerap dipanggil “Ahok”. Basuki memulai karier politiknya sebagai Bupati Belitung Timur pada tahun

2005 – 2006. Dalam kepemimpinannya sebagai Bupati Belitung Timur, Basuki memang sudah menjadi sorotan publik, karena Basuki merupakan Bupati pertama Belitung Timur serta merupakan kaum minoritas di Belitung Timur sendiri. Dibuktikan dengan tulisan Fabian Januarius Kuwado Pada megapolitan.kompas.com di tanggal 15 Febuari 2014

“Ahok adalah bupati pertama dari etnis Tionghoa, jumlahnya 30 persen dari minoritas warga yang ada di Belitung. Selain itu, Ahok adalah bupati pertama yang dipilih secara demokratis. Setelah Kepulauan Bangka-Belitung berdiri sebagai sebuah provinsi pada 2001, Kabupaten Belitung Timur waktu itu dipimpin oleh seorang pelaksana tugas bupati. Ahok kemudian terpilih sebagai bupati pertama pada 2005 di Belitung Timur.”

Kepemimpinan Basuki dimasa jabatan Bupatinya pun tidak sekedar wacana tetapi memang memilki hasil. Muhammad Salim (45), warga Manggar, ingat betul bagaimana Basuki melakukan pembangunan besar-besaran ketika ia menjadi bupati. Ahok membangun kantor pusat pemerintahan menjadi satu kawasan di Belitung Timur, menyulap jalan-jalan menjadi *hotmix*, dan yang paling diingat adalah kesehatan gratis bagi warga di sana. (Fabian Januarius, 2014, para 5 dan 7).

Pada tahun 2012 menjadi tahun awal dimana Ahok menginjakan kaki pertama kali sebagai pejabat nomor 2 di DKI Jakarta sebagai wakil gubernur periode 2012-2014. Selama menjadi wakil gubernur Basuki memang terkenal dengan ketegasannya bahkan karena ketegasan tersebut Basuki menuai banyak kecaman bahkan musuh. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita dari news liputan6 oleh Andi Muttya Kenteng menuliskan 6 “Musuh” Ahok di DKI Jakarta antara lain :

(1) Warga Waduk Pluit, kasus ini Ahok bertindak merelokasi warga Waduk Pluit guna normalisasi Waduk Pluit. Seperti biasanya warga enggan untuk direlokasi, hal ini membuat Ahok gemas. Ahok yang 'gemas' pada warga pun tak tahan untuk mengeluarkan komentar pedasnya.

"Kalau merebut lahan negara, itu namanya otak orang komunis. Itu ingetin kita ke cerita komunis yang merampok tanah orang. Kita harus tegas," cetus Ahok 11 Mei 2013 lalu.

Kata komunis ini pun ditanggapi serius warga Waduk Pluit. Padahal ucapan komunis oleh Ahok itu tak ditujukan untuk warga. Kata komunis dimaksudkan bagi mereka, para pengusaha yang menyewakan tanah negara di Waduk Pluit. Mereka-lah yang diduga berada di balik aksi warga.

(2) Komnas HAM, Dalam kasus ini Ahok kesal karena tujuan baiknya dalam menormalisasi dan melindungi aset negara yakni waduk Pluit harus dijegal oleh tuntutan warga bahwa Ahok melakukan tindak pelanggaran HAM. Dalam kasus ini Ahok menyindir Komnas HAM sebagai berikut :

"Komnas HAM yang terhormat. Mesti ditinjau ulang tuh pengertiannya Komnas HAM. Perlu saya kasih kuliah umum mereka soal HAM itu apa? Ya, saya jelasin HAM itu apa gitu lho. Kalau ini (bendungan atau pintu air) roboh, apa komentar orang terhadap Pak Gubernur dan saya? Mereka akan mengatakan kami membiarkan orang mati kan? Ini melanggar HAM!" serang Ahok 16 Mei 2013 lalu.

(3) Warga Fatmawati, Ahok dituntut oleh Warga Fatmawati oleh karena kepemimpinan Jokowi - Ahok dinilai ingkar janji mengenai pembangunan MRT bawah tanah tetapi Ahok justru memilih membangun MRT layang dengan konsekuensi beberapa warga Fatmawati harus direlokasi. Ahok pun dengan ketus menjawab :

"Saya pilih, dia (warga Fatmawati) tidak pilih saya lagi asal proyek MRT jalan. Jadi tantangan saya sama mereka, jangan pilih saya lagi. Ingat baik-baik! Kita sudah putuskan dengan Pak Gubernur, sekalipun seluruh Jakarta tidak mau pilih kami kembali 2017, transportasi makro harus jalan di DKI, apapun risikonya," ujar Ahok 18 Juli 2013 lalu.

(4) PKL Tanah Abang, Kasus PKL Tanah Abang merupakan kasus yang begitu fenomenal, karena tanah abang sendiri sekian puluh tahun terkenal sebagai lokasi penyebab macet dan terkenal sebagai kandang dari preman Jakarta. Ahok dalam kasus ini berupaya dalam menertibkan PKL di Tanah Abang bahkan Ahok mengancam PKL Tanah Abang yang ngeyel dipenjarakan.

(5) LSM Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis data dana operasional blusukan Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok. Dalam rilis itu disebut Jokowi-Ahok menghabiskan dana senilai Rp 26,6 miliar per tahun. Dengan wacana tersebut Ahok geram karna Ahok melakukan tindak blusukan resmi dan sesuai undang undang. Ahok pun menampik dengan mengatakan *"Anda cuma 2 pilihan Fitra. Bagi saya, Anda bermain politik atau Anda ini yang ngomong agak bodoh,"* kata Ahok 25 Juli lalu.

(6) DPRD Jakarta, Pada saat kasus penertiban PKL Tanah Abang Ahok mewacanakan untuk memecat pejabat daerah atau PNS yang terlibat, tapi jika ada Pejabat DPRD yang bermain maka Ahok menyilakan kepada rakyat yang memecat. Ahok mengatakan *"Kalau DPRD ya rakyat yang mecat, kalau ada pun dia nggak mungkin keluar, malu dong,"*. Dengan perkataan ini Anggota DPRD Haji Lulung terpancing dan mengatakan *"Ahok bilang, ada oknum DPRD bermain di Tanah Abang, sekarang saya bilang, saya jawab nih, Wakil Gubernur*

harus diperiksa kesehatan jiwanya. Karena selama ini ngomongnya selalu sembarangan," ujar Lulung 25 Juli lalu. (Andi Muttya, 2013, para. 3-27)

Tidak hanya kepada warganya ataupun DPRD sebagai pejabat yang statusnya setara dengan jabatan Ahok, Wartawan atau media berita pun juga tidak luput dari amarah Ahok. Bahkan karena ucapan Ahok yang kasar membuat salah satu media besar di Indonesia yaitu Kompas TV dikenakan sanksi oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Dikutip dari vivanews dalam wawancaranya, KPI memberikan sanksi dengan alasan

"Tayangan yang memuat ungkapan atau perkataan kasar/kotor demikian dilarang untuk ditampilkan, karena sangat tidak santun, merendahkan martabat manusia, dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta rentan untuk ditiru oleh khalayak, terutama anak-anak dan remaja," (Aries Setiawan. 2015, para. 4)

Berikut perkataan kasar dan kotor Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digarisbawahi KPI Pusat saat wawancara langsung di Kompas TV;

"...istri saya mau nerima CSR untuk main di kota tua. Lu buktiin aja nenek lu sialan bangsat gua bilang. Lu buktiin aja. Gue juga udah keki".

"...lu lawan bini gua kalah lu mati aja lu. Kasih taik aja muka lu".

"...kalau betul ada suap 12,7 triliun kenapa si DPRD membatalkan lapor ke Bareskrim? Kok goblok sekali lu orang? ...kalau ada bukti memang nyuap apa lu laporin dong bego. ...bego banget lu gitu lho. ...sementara ada bukti gua mau nyuap lu 12,7 triliun, kok lu nggak berani laporin? Gua kuatir lu kemaluan lu punya ga nih? ...eh dibalikin ini yang buat suap. Sialan nggak tuh? Makanya gua bilang panggil gua datang ke angket. Kapan lu panggil biar gua jelasin semua."

“Gua bukain lu taik-taik semua itu seperti apa. ...nggak apa-apa, biar orang tau emang taik gua bilang.... ...kalau bukan taik apa? Kotoran. Silakan. Emang taik namanya kok. Emang taik, mau bilang apa. ...TV jangan pernah wawancara gua live kalo nggak suka kata gua taik segala macem. Itu bodohnya anda mau live dengan saya...”

(Aries Setiawan. 2015, para. 12-16)

Tidak hanya gaya bicara Ahok saja yang menimbulkan polemik serta permusuhan. Retorika Ahok dalam berpidato pun tak jauh berbeda pidato Ahok justru lebih kontroversial dengan bahasa yang seringkali kasar serta dengan gaya tegas. Retorika Ahok yang paling kontroversial adalah ketika pidato memperingati hari anak sedunia di Ancol di hadapan anak-anak.

Berikut perkataan dilayangkan Ahok pada Pidato peringatan Hari Anak Nasional 2015 di Panggung Maksima, Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 26 Agustus 2015. Dikutip dari tulisan Bayu Adi (2015, para. 6,9 dan 15) pada saat ditanyakan oleh Muhammad Salman Al-Farisi, seorang anak binaan Dinas Sosial DKI di Panti Sosial Asuhan *"Tahun lalu uang jajan kami dikasih langsung, tahun ini kenapa tidak Pak?,"* Lalu Ahok menjawabnya *"Kami khawatir bapakmu butuh duit, kemudian uang KJP-mu dipinjam untuk dia kawin lagi,"*. Dalam hal ini Ahok berpikir bahwa pertanyaan ini adalah titipan dari orang tua si anak dan Ahok pun menambahkan *"Sampaikan pada bapaknya, kata Gubernur, orang tua yang seperti itu kurang ajar,"* ujar Ahok

Dari penjabaran gaya bahasa serta retorika Ahok di atas dapat dikatakan banyak dari ucapan Ahok bersifat kontroversional, dan tentunya menuai kontroversi seperti permusuhan bahkan menuai sanksi. Dibalik itu semua yang

membuat peneliti tertarik kepada Ahok adalah kepercayaan publik terhadap Ahok masih tinggi bahkan publik Jakarta khususnya masih loyal terhadap Ahok. Ahok memang terkenal buruk dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya Survey dari litbang Kompas pada 15-20 April 2015, yang menghasilkan bahwa karakter Ahok selama menjadi pejabat di Jakarta mendapat nilai minim dalam hal komunikasi.

Gambar 1.2 Penilaian responden tentang karakter Gubernur DKI Jakarta

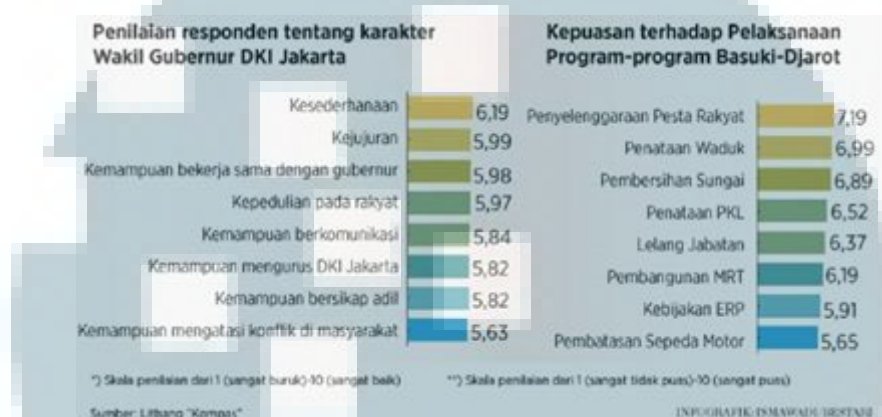


Sumber : Litbang Kompas yang diakses via megapolitan.kompas.com

Dibalik gaya retorika atau kemampuan komunikasi Ahok yang ketus, tegas dan kontroversial Ahok merupakan sosok yang perhatian dengan warganya. Dikutip dari Komaruddin Bagja (2015, para. 2) pengamat politik M Budiayatna mengatakan bahwa *Ucapan-ucapan Ahok itu memang kontroversial, sering kasar. Tapi ingat Ahok seorang pekerja keras, banyak perubahan yang telah dilakukannya baik sebagai Gubernur maupun saat menjadi Wakil Gubernur mendampingi Joko Widodo,*"

Pernyataan M Budiyatna benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Survey litbang Kompas 10 – 15 April menggambarkan persentase kepuasan masyarakat mengenai kinerja Ahok dan hasilnya pun sangat baik.

Gambar 1.3 hasil survey penilaian karakter dan kepuasan kinerja Basuki



Sumber : Litbang Kompas diakses via megapolitan.kompas.com

Tidak hanya survey versi litbang Kompas, Survey Populi Center menggambarkan bahwa Ahok merupakan pemimpin daerah terbaik. Hasil survey ini di kutip dari rappler.com Survey Populi center melibatkan 1,200 responden dari 34 provinsi yang dipilih dengan metode acak bertingkat pada 16 – 22 Januari.

UMN

Gambar 1.4 hasil survey pemimpin daerah terbaik



Sumber : Populi center diakses melalui rappler.com

Dengan adanya banyak bukti diberbagai pemberitaan di media massa maka dapat dikatakan segala retorika yang Basuki ucapkan tidak hanya sekedar wacana tetapi Basuki dibalik itu melakukan kinerja dan hasilnya dapat diterima dan dinikmati oleh warganya sendiri.

Dari fenomena serta permasalahan diatas peneliti tertarik meneliti mengenai Retorika Basuki khususnya dalam hal pidato Basuki. Basuki dinilai buruk dalam kemampuan berkomunikasi serta sering kali menimbulkan kecaman permusuhan hingga diberikan sanksi, tetapi Basuki justru mendapatkan dukungan serta loyalitas warganya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil empat sampel pidato Basuki Tjahaya Purnama dengan tema korupsi. Empat sampel tersebut diambil berdasarkan waktu yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2015, masing masing pertahunnya peneliti mengambil dua sampel. Jadi total sampel menjadi empat pidato. Sampel pertama adalah pidato Basuki pada tanggal 04 September 2014 yang berjudul "Peresmian Transaksi Sewa Rusun

Melalui Bank DKI”. Kedua pada tanggal 14 Desember 2014 dengan judul “Orasi Kebangsaan Dalam Acara Demokrasi Tanpa Korupsi”. Ketiga pidato pada tanggal 14 Desember 2014 dengan judul “Orasi Kebangsaan Dalam Acara Demokrasi Tanpa Korupsi” dan terakhir pidato keempat pada tanggal 15 Sept 2015 dengan judul “Saya Perempuan Anti Korupsi”. Fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengkaji tentang gaya bahasa dan pendekatan retorika Basuki Tjahaya Purnama dalam mempersuasi publik, dalam hal ini Basuki mempersuasi audiens atau pendengarnya.

Penelitian ini menjadi penting dalam mempelajari bagaimana cara seorang pejabat dalam mempersuasi warganya atau publiknya, khususnya ditengah pandangan miring mengenai reputasi pejabat di Indonesia. Bagi peneliti Basuki merupakan suatu fenomena yang unik, Basuki memiliki kemampuan berkomunikasi yang payah atau kurang begitu baik tetapi bisa dipercaya dan justru mendapat dukungan yang baik dari warga Jakarta. Untuk menelaah lebih lanjut maka tinjaukan teoritis yang akan peneliti gunakan adalah teori gaya bahasa Gorys Keraf dan teori pendekatan retorika Aristoteles yakni *Ethos*, *Pathos* dan *Logos* dalam menganalisis pendekatan retorika, peneliti juga menggunakan gaya konsep komunikasi Robert Norton dalam hal gaya komunikasi individual (pribadi komunikator ke lawan bicara), sedangkan analisis persuasi publik peneliti menggunakan teori lima motif imbauan milik Jalaluddin Rakhmat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada point sebelumnya, maka peneliti membulatkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana argumen atau motivasi yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) ketika berpidato berdasarkan pendekatan Retorika Aristoteles (*ethos*, *pathos* dan *logos*)
2. Bagaimana gaya bahasa Basuki Tjahaya Purnama dalam berpidato sebagai pengkajian linguistik khususnya dalam teori gaya bahasa milik Gorys Keraf

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui argumen atau motivasi yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) ketika berpidato berdasarkan pendekatan retorika Aristoteles (*ethos*, *pathos*, dan *logos*)
2. Memaparkan gaya bahasa Basuki Tjahaya Purnama dalam berpidato sebagai pengkajian linguistik khususnya dalam teori gaya bahasa milik Gorys Keraf.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan terselesaikannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal :

1.4.1. Manfaat Akademis

Memberi kontribusi bagi perkembangan kajian keilmuan komunikasi mengenai retorika pemimpin dalam memepersuasi publik. selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan tambahan untuk penelitian selanjutnya, yakni sebagai referensi penelitian ilmu komunikasi khususnya dalam hal retorika kepemimpinan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pemimpin - pemimpin organisasi sekarang dan dimasa yang akan datang, khususnya dalam hal mempersuasi publik.

UMN